



**DINAMIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

***Dynamics of Women's Representation in The DPRD of West Nusa Tenggara
Province in 2024***

Nabilah Bahri¹, Siti Atika Rahmi², Yudhi Lestanata³, Ayatullah Hadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: nabilabahri.3831@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the low representation of women in legislative institutions, particularly in the Regional House of Representatives (DPRD) of West Nusa Tenggara Province, which reached only 1.54% in the 2019 election. The research aims to analyze the opportunities and challenges faced by women in running for legislative office in the 2024 election. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation involving key informants. The results show that despite affirmative policies such as the 30% quota for women being legally mandated, implementation remains hindered by factors such as patriarchal culture, limited access to education and political information, and insufficient party support. Nevertheless, growing gender awareness, central government policies, and increased involvement of women's organizations present greater opportunities for female representation in parliament. In conclusion, increasing both the quantity and quality of women's representation requires continuous efforts from various stakeholders, including the government, political parties, and civil society, to establish a more inclusive and gender-equitable political system.

Keywords: Women Representation; Legislative Elections; Gender Equality; Political Participation; West Nusa Tenggara; Affirmative Policy

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hanya mencapai 1,54% pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% untuk perempuan telah diamanatkan secara hukum, implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor seperti budaya patriarki, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan informasi politik, dan kurangnya dukungan dari partai. Namun demikian, tumbuhnya kesadaran gender, kebijakan pemerintah pusat, dan peningkatan keterlibatan organisasi perempuan memberikan peluang yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Kesimpulannya, peningkatan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan membutuhkan upaya berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan; Pemilu Legislatif; Kesetaraan Gender; Partisipasi Politik; Nusa Tenggara Barat; Kebijakan Afirmatif

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam representasi politik terus menjadi perhatian dunia. Di Indonesia, meskipun berbagai instrumen hukum seperti UU No. 7 Tahun 1984 dan amandemen UUD 1945 telah meletakkan dasar bagi kesetaraan gender, namun realisasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah. Kesenjangan antara peraturan dan implementasi ini terutama terlihat di daerah-daerah dengan budaya patriarki yang mengakar kuat, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana partisipasi perempuan di bidang politik termasuk yang paling rendah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan tindakan afirmatif, termasuk kuota 30% untuk calon anggota legislatif perempuan, yang diamanatkan oleh UU Pemilu dan UU Partai Politik. Namun, terlepas dari upaya-upaya tersebut, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB hanya mencapai 1,54% pada tahun 2019 - jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 21,4%. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan struktural, sosial, dan budaya yang membatasi kemampuan perempuan untuk berkompetisi secara setara dengan laki-laki dalam politik elektoral.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini didasarkan pada konsep Birokrasi Perwakilan yang dikembangkan oleh Kingsley (1944), yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga publik harus mencerminkan demografi populasi yang mereka layani. Menerapkan konsep ini pada lembaga legislatif, rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD NTB mempertanyakan inklusivitas dan legitimasi proses demokrasi di NTB.

Beberapa penelitian telah menyoroti pengaruh nilai-nilai patriarki, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, kurangnya dukungan partai, dan persepsi yang bias gender di ruang publik sebagai tantangan utama partisipasi politik perempuan. Namun, sebagian besar literatur berfokus pada tingkat nasional, sehingga menyisakan kesenjangan dalam memahami dinamika lokal yang unik yang mempengaruhi representasi politik perempuan di tingkat daerah. Penelitian ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan berfokus secara khusus pada pengalaman caleg perempuan di NTB pada pemilu legislatif 2024.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan yang ingin menduduki kursi legislatif di DPRD NTB. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas kebijakan tindakan afirmatif, pengaruh norma sosial budaya, dan mekanisme kelembagaan yang mendukung atau menghambat pencalonan perempuan. Penelitian ini juga menggabungkan perspektif aktor partai politik, pejabat terpilih, dan anggota masyarakat sipil untuk menciptakan analisis yang komprehensif.

Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap diskusi akademis mengenai gender dan politik di Indonesia, tetapi juga pada potensinya untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dan partai politik mengenai hambatan-hambatan terhadap partisipasi politik yang inklusif. Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi advokasi dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan di DPRD.

Makalah ini didorong oleh pertanyaan penelitian kritis berikut ini: Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi peluang dan tantangan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD NTB pada tahun 2024? Untuk menjawab pertanyaan

tersebut, penelitian ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan, praktik partai politik, dan sikap masyarakat yang ada, dengan tujuan akhir untuk mendorong terciptanya lanskap politik yang lebih adil gender di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dialami perempuan dalam menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pemilu legislatif 2024. Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram, pusat politik dan ibukota administratif NTB. Lokasi ini dipilih berdasarkan posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan dan konsentrasi kegiatan partai politik.

Penelitian ini melibatkan dua belas (12) informan kunci yang dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan pengetahuan mereka terkait representasi politik perempuan. Informan terdiri dari empat anggota DPRD perempuan (baik petahana maupun caleg terpilih periode 2024-2029), tiga pengurus partai politik lokal, dua aktivis masyarakat sipil yang berfokus pada isu gender, satu pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, serta dua akademisi yang memiliki spesialisasi di bidang gender dan politik lokal. Para partisipan ini memiliki usia yang bervariasi (mulai dari 27 hingga 54 tahun), latar belakang pendidikan (mulai dari lulusan sekolah menengah hingga pascasarjana), dan mewakili berbagai kelompok etnis seperti Sasak, Bima, dan Mbojo.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan disusun berdasarkan beberapa tema inti, termasuk peluang politik bagi perempuan, hambatan struktural dan kultural, dukungan partai, patriarki, dan persepsi publik terhadap kandidat perempuan. Protokol wawancara ditinjau dan divalidasi oleh penasihat akademis dan ahli gender untuk memastikan relevansi dan kejelasannya. Selain data wawancara primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder seperti hasil pemilu 2019 dan 2024 yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, dokumen peraturan partai, dan kebijakan nasional mengenai kuota 30% caleg perempuan.

Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan dari Januari hingga Maret 2024. Prosesnya meliputi observasi lapangan awal di DPRD dan kantor partai, diikuti dengan wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka atau daring melalui Zoom, dengan setiap sesi berlangsung antara 30 dan 90 menit. Semua partisipan memberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi dalam penelitian ini, dan kerahasiaan mereka dijaga dengan ketat. Penelitian ini juga mencakup analisis dokumentasi terhadap catatan publik dan kerangka hukum yang terkait dengan partisipasi politik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengkodean awal dilakukan untuk mengkategorikan tanggapan berdasarkan area tematik seperti tindakan afirmatif, dukungan partai, hambatan sosial budaya, dan strategi kampanye. Data kemudian disusun dalam matriks untuk mengidentifikasi pola dan hubungan di antara informan yang berbeda. Kesimpulan awal ditarik dan diuji melalui metode

triangulasi dan divalidasi melalui pengecekan anggota dengan informan terpilih.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Peneliti juga melakukan member check dengan membagikan rangkuman interpretasi kepada informan kunci untuk memverifikasi keakuratannya. Selain itu, sesi tanya jawab dengan pembimbing akademik dan kolega juga dilakukan untuk meningkatkan ketelitian analisis dan mengurangi bias peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama terkait peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pemilu legislatif 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, dan temuan-temuannya disajikan secara tematik untuk merefleksikan bidang-bidang utama penelitian.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 menunjukkan sedikit kemajuan. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, dari 892 total caleg, 269 di antaranya adalah perempuan, yang berarti telah memenuhi syarat minimal 30%. Namun, hanya 7 perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif, atau 8,2% dari total 85 kursi di DPRD NTB. Hal ini merupakan peningkatan kecil dari pemilu 2019, yang hanya memiliki 1,54% keterwakilan perempuan, dan menyoroti bahwa meskipun kuota membantu meningkatkan akses, namun tidak menjamin keberhasilan pemilu.

Dalam hal peluang, keberadaan kuota 30% gender dianggap oleh banyak informan sebagai faktor pendukung partisipasi perempuan. Beberapa pengurus partai politik mengakui bahwa peraturan kuota tersebut mendorong partai untuk menyertakan kandidat perempuan, meskipun tidak selalu mendapat dukungan penuh dari lembaga. Beberapa partai melihat kuota sebagai alat untuk meningkatkan citra publik atau hanya untuk memenuhi kewajiban hukum. Kandidat perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi, pengalaman politik sebelumnya, dan peran aktif dalam organisasi masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk dicalonkan dan berkampanye secara lebih strategis.

Terlepas dari kerangka kebijakan tersebut, hambatan struktural dan kultural tetap ada. Banyak informan perempuan melaporkan bahwa mereka mengalami penolakan dari masyarakat karena sikap patriarkis yang berlaku. Di masyarakat pedesaan dan konservatif, terdapat kepercayaan yang meluas bahwa kepemimpinan politik pada dasarnya adalah domain laki-laki. Kandidat perempuan sering kali menghadapi sikap skeptis selama acara kampanye, dan dalam beberapa kasus, diremehkan oleh rekan-rekan partai mereka sendiri. Ekspektasi sosial seputar peran domestik perempuan juga membatasi ketersediaan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan politik. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap dana kampanye yang memadai, yang membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau pemilih secara efektif.

Peran partai politik merupakan faktor penting lainnya. Meskipun partai-partai secara resmi menerima kuota 30%, banyak partai yang tidak memberikan dukungan nyata dalam hal pembiayaan kampanye, pelatihan, atau bimbingan. Beberapa informan mengindikasikan bahwa mereka ditempatkan di urutan bawah dalam

daftar kandidat atau dipilih hanya untuk memenuhi persyaratan minimum, tanpa promosi yang serius atau posisi strategis. Praktik ini secara signifikan mengurangi peluang mereka untuk terpilih dan memperkuat sifat simbolis daripada substantif dari partisipasi perempuan.

Selain itu, strategi kampanye yang digunakan oleh perempuan juga bervariasi. Mereka yang berhasil biasanya berfokus pada keterlibatan akar rumput, menargetkan kelompok perempuan, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, dan membangun narasi perubahan dan inklusivitas. Sebaliknya, kandidat perempuan yang gagal menang melaporkan bahwa mereka merasa terisolasi dari struktur partai, kekurangan sumber daya keuangan, dan menerima bimbingan yang minim. Beberapa bahkan terpaksa mendanai sendiri kampanye mereka, yang menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kandidat laki-laki yang memiliki jaringan politik yang mapan dan akses ke donor.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja kelembagaan seperti kebijakan tindakan afirmatif telah membuka pintu bagi perempuan dalam politik, berbagai tantangan budaya, struktural, dan institusional yang mengakar terus menghalangi partisipasi yang berarti bagi mereka. Data menunjukkan bahwa meningkatkan kuantitas kandidat perempuan tidaklah cukup; sebaliknya, meningkatkan kualitas sistem pendukung dan mengurangi hambatan sosial-politik sangat penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peluang perempuan untuk menduduki jabatan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 telah meningkat, namun peluang tersebut masih dibatasi oleh tantangan struktural, kultural, dan politis. Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengejar peran legislatif-dicapai melalui data kualitatif yang dikumpulkan dari para aktivis, perwakilan partai politik, dan caleg perempuan.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, dan peningkatan kesadaran publik akan kesetaraan gender telah menciptakan lingkungan politik yang lebih baik bagi perempuan. Namun, kemajuan ini masih dirusak oleh norma-norma patriarki yang telah mengakar, kurangnya modal politik di antara kandidat perempuan, tokenisme dalam struktur partai, dan terbatasnya akses terhadap pendanaan kampanye. Tantangan-tantangan ini menghambat banyak perempuan untuk tidak hanya memasuki arena politik, tetapi juga mempertahankan pengaruhnya setelah terpilih.

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan upaya yang lebih substantif, bukan hanya simbolis, untuk memberdayakan perempuan secara politik. Hal ini mencakup komitmen yang lebih kuat di tingkat partai terhadap pencalonan perempuan, program peningkatan kapasitas, dan reformasi struktural yang mengatasi hambatan ekonomi dan sosial budaya.

Secara metodologis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman gender dan politik di wilayah yang terdesentralisasi dan beragam agama seperti Nusa Tenggara Barat, dengan menyoroti pentingnya nuansa kontekstual dalam menganalisis partisipasi politik perempuan. Temuan-temuan ini sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang menekankan kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi praktis kuota gender, namun menawarkan interpretasi yang lebih lokal dan spesifik untuk dinamika tingkat provinsi.

Penelitian ini dibatasi oleh fokus geografis dan jumlah informan, dan penelitian di masa depan dapat memperluas cakupannya dengan menyertakan perspektif komparatif di berbagai provinsi atau dalam siklus pemilu yang berbeda.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan di tingkat akar rumput, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan partai, dan mengintegrasikan anggaran yang responsif gender dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan mekanisme dukungan jangka panjang bagi politisi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chusna, Fitria. 2024. *Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 diPrediksi Paling Tinggi*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024>, [diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.40].
- Inwantoro, Totok. 2014. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014*. <https://www.fisip.undip.ac.id>, [diakses pada 6 Januari 2022, pukul 07.51] .
- Fatimah, Harpani, Akhmad Rudini Akbar. 2014. Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7.
- Farida Hanum. 2018. *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.
- Jovani, Audara. 2018. Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*, Vo.1, No.1.
- Khaerunnisa. 2017. Perempuan dan Politik (Studi Perbandingan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar). *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Monawarah, Lailatul. 2017. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah (Studi calon Anggota Legislatif perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2014). *Aspirasi: Jurnal S-1 Ilmu Politik*, Vol. 5, No.2.
- Wahyudi, Very. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, 63-83.
- Winengan, Juli. 2018. Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Langsung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, 63-65.
- Yan. 2021. *Isiue Satu-Satunya Perempuan Lolos ke DPRD NTB*, <https://radarlombok.co.id/isiue-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html>, [diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.44].

